

BAB IV
UPAYA AUSTRALIA UNTUK MENCAPAI
KEPENTINGAN NASIONAL DI CELAH TIMOR
(TIMOR LESTE)

Untuk mencapai suatu tujuan atau kepentingan nasional, maka sebuah negara akan mengeluarkan kebijakan, dimana kebijakan tersebut direalisasikan sebagai tindakan nyata atau bisa disebut upaya yang dilakukan untuk mencapai kepentingan suatu negara tersebut. Begitupun dengan Australia yang mempunyai beberapa upaya yang dilakukan untuk mencapai kepentingannya di Celah Timor (Timor Leste).

Untuk itu dalam bab ini penulis akan menjelaskan upaya apa saja yang telah dilakukan Australia untuk mencapai kepentingan Australia di Celah Timor (Timor Leste) sebagaimana telah dijelaskan kepentingan Australia dalam bab sebelumnya. Dalam bab ini penulis akan menjelaskan upaya yang telah dilakukan Australia untuk kepentingannya dalam periode 1972-2005.

A. Periode 1972-1975,

**1. Australia Mengadakan Perundingan Dengan Indonesia
Tentang Batas Wilayah Laut**

Telah disebutkan pada penjelasan sebelumnya bahwa di era 1970an Australia disibukkan dengan antisipasi-antisipasi yang dilakukan untuk menanggulangi kemungkinan-kemungkinan meledaknya peperangan yang terjadi di kawasan Asia Tenggara yang disebabkan oleh

perang dingin, yang bisa terjadi sewaktu-waktu dan akan berdampak langsung bagi keamanan nasional Australia, karena jaraknya yang sangat dekat dengan kawasan Asia Tenggara. Untuk itu Australia berusaha agar tidak terjadi hal-hal yang bisa memicu konflik dikawasan Asia tenggara.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah menjaga hubungan baik dengan negara-negara yang berbatasan langsung dengan Australia yaitu Indonesia dan Timor Leste (masih dibawah kekuasaan Portugal) yang berbatasan langsung sekaligus menjadi negara yang menjadi tembok pertahanan Australia dari negara-negara yang sudah masuk pada permainan perang yang disebabkan perang dingin seperti Vietnam dan Kamboja.

Untuk negara-negara yang mempunyai masalah perbatasan dengan negara tetangganya, maka untuk menghindari konflik maka negara-negara yang bersangkutan akan berusaha menyelesaikan masalah perbatasan tersebut. Karena masalah yang menyangkut dengan perbatasan dengan kata lain menyangkut kedaulatan wilayah merupakan suatu masalah yang sensitif dan sangat berpotensi menimbulkan perang. Untuk itu Australia yang ketika itu berusaha menciptakan kestabilan kawasan agar tidak terpengaruh dampak dari perang dingin yang menebar ancaman berupa peperangan, maka Australia segera menyelesaikan masalah perbatasan dengan Indonesia dan Timor Leste di tahun 1972.

Perundingan masalah batas wilayah dengan Indonesia sebenarnya sudah dilakukan oleh Australia sejak tahun 1969, Australia dan Indonesia memulai perundingan atas laut antar dua negara pada tahun tersebut. Kemudian pada tahun 1972 muncul kesepakatan batas laut dua negara berdasarkan landas kontinen benua Australia yang berada di dekat perairan Indonesia. Penyelesaian perbatasan laut antara kedua negara di atas juga dianggap sah karena UNCLOS sendiri memberikan ruang bagi Negara-negara yang batas lautnya overlapping untuk membuat kesepakatan-kesepakatan secara bilateral. Proses negosiasi bilateral ini biasanya lebih menguntungkan negara yang memiliki pengaruh lebih kuat daripada negara lain. Australia secara ekonomi, militer, politik, dan pimpinan di kawasan Asia Pasifik relatif memposisikan dirinya sebagai hegemon sehingga mampu mempengaruhi Indonesia untuk mengikuti kemauan Australia.⁵⁸

Akhirnya pada tahun 1972, Indonesia dan Australia menandatangani Kesepakatan mengenai batas dasar laut dengan prinsip landas kontinental yang sekarang tidak diberlakukan lagi, dan membuat batas dasar laut lebih dekat dengan Indonesia dari pada Australia. meskipun Portugal (sebagai penguasa kolonial Timor Lorosa'e pada saat itu) menolak untuk ikut dalam perundingan tersebut yang menyebabkan

⁵⁸ Frank Brennan, SJ, 2004, " *The Timor Sea's oil and Gas What's Fair ?*" Melbourne, Catholic Social Justice Series No.51, dalam <http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/2s1hi/207613041/bab2.pdf> diakses 13 Oktober 2012

pembuatan batas tidak rampung seluruhnya, dan akhirnya muncul celah yang tak berbatas yang dinamakan “Celah Timor atau Timor Gap”⁵⁹

Australia melakukan perundingan tersebut dan segera ingin menyelesaikan masalah perbatasan wilayah laut yang memisahkannya dengan Indonesia dan Timor Leste untuk menghindari kemungkinan terjadinya konflik yang menyeret Australia pada peperangan yang menjadi ancaman ketika itu. Karena Australia ingin menciptakan kestabilan di kawasan Asia tenggara yang sangat dekat jaraknya dengan Australia. Karena jika terjadi konflik akan berdampak langsung ke negara Australia. Namun dengan sikap Portugal yang tidak bersedia ikut serta dalam perundingan masalah perbatasan yang menyangkut Timor Leste yang merupakan negara kekuasaan dari Portugal ini membuat perundingan masalah perbatasan dengan Indonesia dan Timor Lesate ini tidak selesai semuanya, dengan kata lain perundingan tersebut menyisakan masalah yang baru yaitu munculnya Celah di Laut Timor yang menjadikan statusnya tidak jelas tentang negara mana yang berhak atas wilayah tersebut antara Australia, Indonesia ataukah Timor Leste yang ketika itu masih dibawah kekuasaan Portugal.

Portugal tidak mau mengikuti dalam perundingan yang dilakukan Australia dan Indonesia yang membahas tentang perbatasan laut yang melibatkan wilayah Timor Leste karena pada waktu itu Portugal menghendaki batas laut diukur berdasarkan hukum laut

⁵⁹ “ *Latar Belakang Sejarah Laut Timor* “, Buletin Lao Hamutuk, vol 4, no 3-4, Agustus 2003, hal 2.

internasional yang menetapkan garis tengah laut antara dua negara, sehingga garis batas berada persis di tengah-tengah. Laut antara Australia dan Timor Leste. Sementara, Australia menghendaki penentuan batas laut berdasarkan landas kontinentalnya. Landas kontinental menunjukkan bahwa secara alamiah, batas wilayah Australia berada di sisi selatan Timor sejauh tiga mil yang terdapat di bagian laut dalam. Berdasarkan batas wilayah ini, Australia memiliki kontrol sekitar tiga perempat luas landas kontinentalnya yang berdekatan dengan Indonesia sehingga masuk lebih jauh melampaui daerah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia menurut hukum laut internasional.⁶⁰

Perundingan masalah perbatasan memeing memunculkan masalah baru yaitu munculnya Celah Timor yang statusnya tidak jelas, yang tentu saja hal tersebut sangat berpotensi menimbulkan konflik di kemudian hari. Namun paling tidak di tahun 1972 yang ketika itu masih berlangsung perang dingin, Australia setidaknya sudah menyelesaikan masalah perbatasan dengan negara tetangga yang cukup berpengaruh di Asia Tenggara ketika itu yaitu Indonesia. Dengan demikian Australia merasa sudah menghilangkan satu masalah yang jika tidak diselesaikan akan berpotensi menimbulkan konflik dengan Indonesia.

⁶⁰ Charles Scheiner 2003, " *Tinjauan Ulang Mengenai Minyak dan Gas di Laut Timor*", Dili, Lao Hamutuk, dalam <http://www.library.upnvi.ac.id/pdf/2s1hi/207613041/bab2.pdf> diakses 13 Oktober 2012

2. Australia Memberikan Dukungan Terhadap Invasi Indonesia Atas Timor Leste

Fokus Australia untuk menjaga perdamaian di negara tetangga yang menjadi bentengnya yaitu Indonesia dan Timor Leste mendapatkan sedikit tantangan ketika terjadi konflik atau perang saudara di Timor Leste yang disebabkan oleh melemahnya kekuatan Portugal yang menjadi penguasa di Timor Leste ketika itu.

terlebih saat terjadi situasi dimana Portugal ketika itu disibukkan dengan masalah dalam negerinya. Ditambah lagi Pada tanggal 27 Agustus 1975, di tengah pertempuran antara kelompok yang Pro Indonesia dengan Fretilin, gubernur Portugal beserta stafnya, para dokter dan anggota militer secara diam-diam meninggalkan Dili di tengah malam menuju ke pulau Atauro di lepas pantai Timor, di mana mereka tinggal sampai bulan Desember 1975, sebelum bertolak ke Portugal. Sejak Agustus 1975 tidak ada lagi pemerintahan Portugal di Timor Leste. Penyerahan kekuasaan tidak pernah diadakan, dekolonisasi tidak pernah diselesaikan.⁶¹

Sejak kekosongan kekuasaan terjadi di Timor Leste pasca keluarnya perwakilan-perwakilan Portugal dari tanah Timor Leste, muncul isu-isu tentang rencana Indonesia dibawah rezim Soeharto untuk

⁶¹ Hanung Hamada, " *Timor Gap Treaty 1989 dan Implikasinya bagi Timor Timur*", dalam <http://hanunghisbullahhamda.blogspot.com>, diakses 28 september 2012

melakukan invasi terhadap Timor Leste. Sehingga hal tersebut memicu perang saudara yang terjadi di Timor Leste.

Keinginan Portugis melepaskan koloninya menumbuhkan reaksi berlainan dari pihak penduduk Timor Timur maupun pemerintah Indonesia di Jakarta. Situasi politik di Timor Timur, sebelum invasi Indonesia pada 7 Desember 1975, sangat tidak stabil. Pada awal tahun 1975 ketidakstabilan ini terjadi karena terkait dengan kedaulatan nasional. Timor Timur berintegrasi dengan Indonesia atas dukungan Australia pada tahun 1976. Sebelum berintegrasi di Timor Timur juga muncul orang-orang yang berorganisasi untuk tujuan mencapai kemerdekaan, bebas dari Indonesia maupun Portugis. Menjelang Timor Timur bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), rakyat Timor Timur terbagi ke dalam tiga golongan yang berbeda pandangan. *Pertama*, kelompok yang menginginkan Timor Timur untuk menjadi bagian dari federasi dengan Portugis; *kedua*, kelompok yang menginginkan agar Timor Timur menjadi bagian dari negara Indonesia; dan *ketiga*, kelompok yang menginginkan agar Timor Lorosae menjadi suatu bangsa yang merdeka.⁶²

Kekacauan semakin menjadi-jadi di Timor Leste ketika FRETILIN mulai menebar ancaman kekerasan dengan pihak-pihak yang bertentangan dengan keinginan mereka. Fretilin merupakan kependekan

⁶² Vitalis Goo, "Struggle For Freedom", dalam <http://www.vitalis-gooubo-goo.blogspot.com/> diakses 26 september 2012.

dari *Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente* yang dalam bahasa Portugis adalah sebuah gerakan pertahanan yang berjuang untuk kemerdekaan Timor Timur, pertama dari Portugal dan kemudian dari Indonesia, antara tahun 1974 dan tahun 1998. Pada awalnya, Fretilin bernama *Associação Social Democrática Timorese* (ASDT). Setelah Timor Timur mendapatkan kemerdekaan dari Indonesia, Fretilin menjadi salah satu partai politik yang berusaha mendapatkan kuasa dalam sistem multi-partai.⁶³

Setelah itu FRETILIN menurunkan bendera Portugal dan mendeklarasikan Timor Leste sebagai Republik Demokratik Timor Leste pada tanggal 28 November 1975. Menurut suatu laporan resmi dari PBB, selama berkuasa selama 3 bulan ketika terjadi kevakuman pemerintahan di Timor Leste antara bulan September, Oktober dan November, Fretilin melakukan pembantaian terhadap sekitar 60.000 penduduk sipil (sebagian besarnya wanita dan anak-anak karena para suami mereka adalah pendukung faksi integrasi dengan Indonesia). Berdasarkan itulah, kelompok pro-integrasi kemudian mendeklarasikan integrasi dengan Indonesia pada 30 November 1975 dan kemudian meminta dukungan Indonesia untuk mengambil alih Timor Leste dari kekuasaan FRETILIN yang berhaluan Komunis. Tiga Kuburan Masal sebagai bukti pembantaian FRETILIN terhadap pendukung integrasi terdapat di Kabupaten Aileu (bagian tengah Timor Leste), masing-masing terletak di

⁶³ "Fretilin", dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/Fretilin> diakses 13 oktober 2012

daerah Saboria, Manutane dan Aisirimoun. Ketika pasukan Indonesia mendarat di Timor Leste pada tanggal 7 Desember 1975, FRETILIN memaksa ribuan rakyat untuk mengungsi ke daerah pegunungan untuk dijadikan tameng hidup atau perisai hidup (human shields) untuk melawan tentara Indonesia. Lebih dari 200.000 orang dari penduduk ini kemudian mati di hutan karena penyakit dan kelaparan. Selain terjadinya korban penduduk sipil di hutan, terjadi juga pembantaian oleh kelompok radikal FRETILIN di hutan terhadap kelompok yang lebih moderat. Sehingga banyak juga tokoh-tokoh FRETILIN yang dibunuh oleh sesama FRETILIN selama di Hutan. Semua cerita ini dikisahkan kembali oleh orang-orang seperti Francisco Xavier do Amaral, Presiden Pertama Timor Leste yang mendeklarasikan kemerdekaan Timor Leste pada tahun 1975. Seandainya Jenderal Wiranto (pada waktu itu Letnan) tidak menyelamatkan Xavier di lubang tempat dia dipenjarakan oleh FRETILIN di hutan, maka mungkin Xavier tidak bisa lagi jadi Ketua Partai ASDT di Timor Leste sekarang.⁶⁴

Saat-saat pasca keluarnya Portugal dari Timor Leste meninggalkan konflik yang muncul akibat perang saudara yang disebabkan perbedaan orientasi guna menentukan nasib dari Timor Leste

⁶⁴ Devania Annesya, "MASALAH TIMOR TIMUR DAN POLITIK LUAR NEGERI RI", dalam <http://frenndw.wordpress.com/tag/timor-timur/> diakses 13 oktober 2012

itu sendiri pasca keluarnya Portugal dari tanah mereka. Di satu sisi pihak FRETILIN menginginkan agar Timor Leste menjadi negara yang merdeka dan berdaulat, sementara pihak lain menginginkan agar Timor Leste bergabung dengan Indonesia. Perbedaan ini menyeret Timor Leste pada situasi konflik antar masyarakatnya yang menimbulkan banyaknya korban. Hal ini dikhawatirkan oleh banyak negara barat termasuk Amerika Serikat dan Australia akan membawa ketidakstabilan di kawasan Asia.

Belum lagi disaat terjadi kemelut persoalan perang saudara yang terjadi di Timor Leste, banyak yang menyebut bahwa satu kelompok yang berkonflik merupakan pihak yang berhaluan kiri atau pengikut ideologi komunis, yang merupakan musuh dari blok barat yang didalamnya ada Amerika Serikat dan Australia. Karena memang saat itu berbarengan dengan terjadinya perang dingin antara ideologi Komunis (blok timur) dan ideologi Liberal (blok barat). Langkah invasi terhadap Timor Leste yang diambil oleh pemerintah Soeharto ini juga bentuk keinginan untuk menunjukkan eksistensi terhadap negara sekutunya yaitu Amerika Serikat dalam memerangi komunisme. Dimana saat itu disinyalir berkembangnya paham komunisme di Timor Leste. Sehingga dengan otomatis Indonesia mendapat dukungan penuh dari Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, Sehingga isu berkembangnya Komunis di Timor Leste tersebut dijadikan alasan Soeharto dalam mencari dukungan terhadap negara-negara barat termasuk Australia untuk

langkah menyatukan Timor Leste kedalam NKRI. Sehingga langkah Indonesia yang ingin menganeksasi Timor Leste dengan alasan memerangi komunis disambut baik oleh negara-negara barat termasuk Amerika Serikat.

Selain negara-negara barat dan Amerika Serikat, Australia juga jelas berkepentingan agar Timor Timur ini juga tidak jadi sumber instabilitas kawasan Asia Tenggara yang jadi zona penyangga keamanannya dari serangan utara. Sejak awal Australia memahami langkah yang diambil Indonesia untuk menggabungkan kawasan berpenduduk sekitar satu juta jiwa itu kedalam negara kesatuan Republik Indonesia. Bahkan secara eksplisit mengakui kedaulatan Indonesia atas Timor Timur.⁶⁵ Bentuk dukungan Australia ini seolah-olah dilatarbelakangi karena tidak ada pilihan lain bagi Australia ketika itu karena menyangkut keamanan nasional Australia. Karena Timor Leste dan Indonesia ketika itu menjadi benteng bagi Australia untuk menghindari serangan dari utara (negara-negara Komunis yang dianggap mengancam).

Ktika isu tersebar tentang sudah masuknya komunis sampai ke Timor Leste membuat Australia khawatir hal tersebut akan memicu peperangan antara negara yang pro Komunis dan pro Liberal. Dan jika perang terjadi di kawasan yang berbatasan langsung dengan wilayah Australia maka akan membawa dampak ketidakstabilan yang luar biasa

⁶⁵ *Ibid*

baik yang bersifat ketidakstabilan kawasan bahkan mengancam ketidakstabilan nasional negara Australia sendiri. Untuk itu Amerika Serikat, sebagai pemimpin poros blok barat serta Australia menginginkan masalah yang terjadi di Timor Leste ini agar segera dapat diselesaikan. Dan situasi tersebut dimanfaatkan Indonesia untuk melakukan invasi yang membuat Australia mau tidak mau harus mendukung politik yang dimainkan Indonesia demi menghindari instabilitas di kawasan Asia tenggara, yang jika terjadi akan merugikan bagi Australia. Karena jika pecah perang di kawasan yang dekat dengan Australia tersebut maka hal itu akan menyeret Australia juga pada situasi konflik yang akan merugikan negara Australia.

Akhirnya Amerika Serikat dan Australia mendesak Indonesia ketika itu dibawah rezim Soeharto untuk segera menyelesaikan masalah yang terjadi di Timor Leste dengan munculnya Komunis di negara tersebut. Akhirnya Soeharto memulai aksi invasinya terhadap Timor Leste dengan operasi yang disebut operasi Seroja.

Operasi Seroja adalah sandi untuk invasi Indonesia ke Timor Timur yang dimulai pada tanggal 7 Desember 1975. Pihak Indonesia menyerbu Timor Timur karena adanya desakan Amerika Serikat dan Australia yang menginginkan agar Fretilin yang berpaham komunisme tidak berkuasa di Timor Timur. Selain itu, serbuan Indonesia ke Timor Timur juga karena adanya kehendak dari sebagian rakyat Timor Timur yang ingin bersatu dengan Indonesia atas alasan etnik dan

sejarah. Angkatan Darat Indonesia mulai menyebrangi perbatasan dekat Atambua tanggal 17 Desember 1975 yang menandai awal Operasi Seroja. Sebelumnya, pesawat-pesawat Angkatan Udara RI sudah kerap menyatroni wilayah Timor Timur dan artileri Indonesia sudah sering menyapu wilayah Timor Timur. Kontak langsung pasukan Infantri dengan Fretilin pertama kali terjadi di Suai, 27 Desember 1975. Pertempuran terdahsyat terjadi di Baucau pada 18-29 September 1976. Walaupun TNI telah berhasil memasuki Dili pada awal Februari 1976, namun banyak pertempuran-pertempuran kecil maupun besar yang terjadi di seluruh pelosok Timor Timur antara Fretilin melawan pasukan TNI. Dalam pertempuran terakhir di Lospalos 1978, Fretilin mengalami kekalahan telak dan 3.000 pasukannya menyerah setelah dikepung oleh TNI berhari-hari. Operasi Seroja berakhir sepenuhnya pada tahun 1978 dengan hasil kekalahan Fretilin dan pengintegrasian Timor Timur ke dalam wilayah NKRI. Selama operasi ini berlangsung, arus pengungsian warga Timor Timur ke wilayah Indonesia mencapai angka 100.000 orang. Korban berjatuhan dari pihak militer dan sipil. Warga sipil banyak digunakan sebagai tameng hidup oleh Fretilin sehingga korban yang berjatuhan dari sipil pun cukup banyak. Pihak Indonesia juga dituding sering melakukan pembantaian pada anggota Fretilin yang tertangkap selama Operasi Seroja berlangsung.⁶⁶

⁶⁶"Operasi Seroja", dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Operasi_Seroja diakses 13 oktober 2012

Dengan keberhasilan operasi Seroja yang dilancarkan pemerintah RI terhadap Timor Leste menandakan bergabungnya Timor Leste menjadi salah satu provinsi di Indonesia. Membuat Australia sedikit tenang karena dengan masuknya Timor Leste ke dalam bagian Indonesia, maka Australia hanya perlu berdiplomasi dengan satu negara yaitu Indonesia untuk memastikan keamanan nasional dari serangan utara yang ketika itu ancaman yang menakutkan diartikan sebagai ancaman yang muncul dari negara-negara Komunis. Dan dengan masuknya Timor Leste menjadi bagian dari Indonesia menandakan Komunisme di Timor Leste sudah hilang, karena Australia tahu bahwa pemimpin Indonesia ketika itu (Soeharto) merupakan sosok yang anti Komunis dan merupakan sekutu dari Amerika Serikat yang beraliansi dengan Australia.

B. Periode 1989-1999,

1. Australia Berunding Tentang Kesepakatan Celah Timor Dengan Indonesia

Setelah Australia memberikan dukungan terhadap Indonesia tentang invasi negara tersebut kepada Timor Leste dengan alasan keamanan, maka pada akhir tahun 1980-an orientasi Australia terhadap Timor Leste dan Celah Timor berubah menjadi orientasi ekonomi seiring isu-isu atau laporan bahwa terdapat kandungan minyak dan gas bumi di Celah Timor.

Setelah tahun 1972 dimana Australia dan Indonesia menyepakati tentang perjanjian perbatasan laut antara kedua negara dimana ketika itu menyisakan masalah Celah Timor akibat tidak ikut sertanya Portugal dalam perundingan tersebut, maka setelah Timor Leste masuk kedalam wilayah Indonesia akibat dari invasi yang dilakukan di tahun 1975 dengan dukungan dari Australia, maka Australia mulai berfikir tentang penyelesaian masalah perbatasan di Celah Timor yang statusnya sempat tidak jelas karena Portugal sebagai penguasa Timor Leste pada tahun 1972 tidak mau ikut dalam perundingan perbatasan yang diadakan Australia dan Indonesia.

Akhirnya pada tahun 1979, setelah kecaman internasional atas kekerasan intervensi Indonesia di Timor Timur telah mereda, Australia mulai berunding dengan Indonesia. Sementara itu, 200 mil zona eksklusif ide ekonomi, dan pendekatan garis tengah untuk menentang batas-batas antara garis pantai, mulai mendapatkan dukungan internasional. Australia, bagaimanapun, menolak solusi yang ada dan "Gap" tetap.⁶⁷ Itu artinya Australia menolak prinsip-prinsip ZEE sejak awal bahkan sebelum hukum batas laut tersebut di tetapkan. Karena hukum laut tersebut ditetapkan tahun 1982, sementara perundingan awal Australia dengan Indonesia terjadi pada tahun 1979.

⁶⁷ Rephoyt, " *Celah Timor atau Timor GAP. Sebuah Pandangan*", dalam <http://rephoyt.blogspot.com/2011/09/celah-timor-atau-timor-gap-sebuah.html> diakses 26 september 2012.

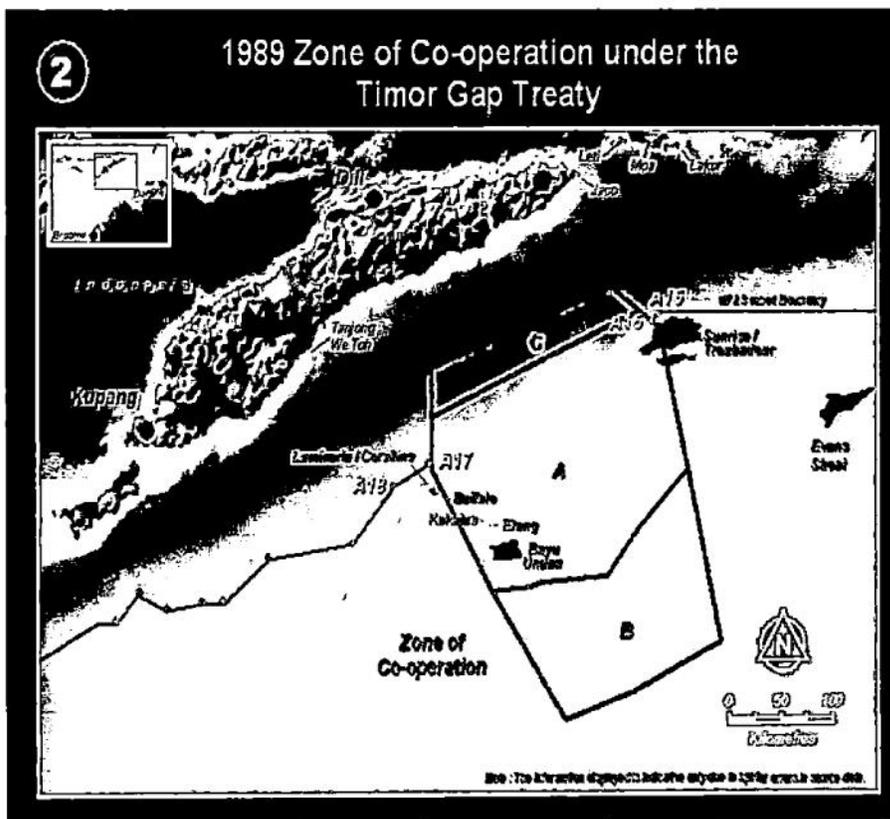
Perjalanan perundingan tentang status Celah Timor antara Australia dan Indonesia cukup menarik dan melalui beberapa batu sandungan diantaranya terdapat perbedaan sistem hukum dalam penetapan batas kontinen Celah Timor. Kedua pihak Indonesia dan Australia tetap mempertahankan sistem hukum masing-masing. Indonesia ingin menetapkan batas perairan di Celah Timor dengan sistem *median line* dan ZEE (berdasarkan Konvensi Jenewa 1982). Sedangkan Australia dengan sistem *bathymetric axis line*, penetapan batas berdasarkan sumbu terdalam dari laut, atau Palung Timor-Banda.⁶⁸

Selain itu sebelum penandatanganan juga muncul perdebatan dan kritik, bahwa seolah-olah pihak Indonesia menyerah atau dirugikan dalam perjanjian tersebut. Istilah "dirugikan" itu antara lain datang dari mendiang Prof Ir Herman Johannes, mantan Rektor UGM, Di saat itu, mendiang Prof Johannes menolak kesepakatan tersebut, karena menganggap kesepakatan memberikan bagian kepada Indonesia (Zona C) itu hanya fiktif. Artinya, kandungan minyak di Zona C-nya, nol atau amat sedikit. Dan kalau memberikan bagian 50 persen kepada Australia bagi Zona A, dan menerima bagian hanya 1,6 persen dari Zona B, juga sama dengan memberikan porsi yang terlalu besar untuk Australia, dan dengan sendirinya amat tidak adil (bagi Indonesia). ditambah lagi Dari

⁶⁸ SUARA PEMBARUAN DAILY, "Membagi Keuntungan Dari Minyak Celah Timor", dalam <http://flobamora.tripod.com/minyak.htm> diakses pada 26 september 2012.

pihak lain juga memberikan kritikan, khususnya DPR-RI meminta agar Indonesia tetap menerapkan sistem hukum *median line*, atau bahkan berdasarkan batas 200 mil dari zona ekonomi eksklusif (ZEE). Untuk menentukan batas Celah Timor dengan Australia.⁶⁹

Gambar 5. Peta Joint Petroleum Development Area (JPDA)



(sumber: <http://www.google.co.id> diakses 31 oktober 2012)

Namun dengan desakan yang dilancarkan Australia terhadap pemerintah Indonesia maka pemerintah Indonesia berusaha meyakinkan pihak-pihak dari dalam negeri yang tidak setuju dengan rancangan

⁶⁹ *Ibid.*

kesepakatan antara Australia dan Indonesia mengenai pembagian hasil serta penentuan batas di Celah Timor.

Beberapa upaya pemerintah Indonesia untuk meyakinkan pihak-pihak yang tidak setuju diantaranya, Menlu Ali Alatas menguraikannya secara rinci di depan DPR RI, menjelang ratifikasi RUU Celah Timor, pada akhir November 1990. Menlu mengatakan berdasarkan Konvensi Laut 1982, rezim Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) haruslah dibedakan dengan rezim batas landas kontinen. Selain Menlu Alatas juga mengirim dua pejabat tinggi Deplu menemui Prof Johannes di Yogya. Kedua pejabat tinggi Deplu itu mengadakan pendekatan dan memberikan berbagai informasi mengenai kesepakatan yang telah dicapai.⁷⁰ Dengan langkah-langkah tersebut akhirnya perselisihan pendapat antara pihak-pihak dalam negeri Indonesia dapat terpecahkan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pengaruh yang dibawa oleh Australia terhadap Pemerintah Indonesia begitu besar hingga dapat mempengaruhi Indonesia untuk menyetujui kesepakatan Celah Timor yang ditawarkan Australia meskipun pemerintah Indonesia mendapatkan tekanan dari pihak-pihak dalam negeri yang tidak menyetujui perjanjian tersebut.

Akhirnya pada tanggal 11 Desember 1989 telah terjadi kesepakatan antara Indonesia Australia mengenai zona kerjasama di daerah antara Provinsi Timor Timur dan Australia bagian Utara, yang

⁷⁰ *Ibid.*

kemudian dituangkan dalam bentuk perjanjian. Lahirnya perjanjian ini diawali dari belum adanya kesepakatan yang jelas mengenai batas landas kontinen antara Indonesia dan Australia, khususnya di daerah selatan Timor Timur (celah Timor), padahal di daerah tersebut terdapat kekayaan alam yang berupa minyak bumi dan gas. Agar tidak mengganggu hubungan bilateral yang baik antara kedua negara tersebut dan untuk dapat memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di celah Timor, maka kemudian kedua negara sepakat untuk membuat perjanjian yang mengatur masalah pemanfaatan sumber daya alam di daerah tersebut.⁷¹

Inti dari perjanjian tersebut antara lain mengatur mengenai pembagian hasil atas pemanfaatan gas dan minyak bumi di celah Timor tersebut. Di dalam perjanjian tersebut juga disepakati bahwa besar bagian masing-masing negara dari keuntungan yang diperoleh atas pengelolaan minyak bumi dan gas di daerah tersebut adalah 50 : 50, dengan kata lain, Indonesia dan Australia saling membagi keuntungan dari hasil yang diperoleh dengan prosentase sebesar 50% untuk Indonesia dan 50% untuk Australia.⁷²

Dengan upaya Australia untuk mengadakan perundingan dengan Indonesia yang menghasilkan kesepakatan Celah Timor yang mebagi

⁷¹ Yulianto Achmad, "Eksistensi Perjanjian Antara Indonesia Dengan Australia Tentang Zona Kerjasama Di Daerah Antara Timor Leste Dan Australia Bagian Utara Dalam Hal Timor Leste Menjadi Negara Merdeka", dalam Hanung Hamada, "Timor Gap Treaty 1989 dan Implikasinya bagi Timor Timur", dalam <http://hanunghisbullahhamda.blogspot.com/2011/04/timor-gap-treaty-1989-dan-implikasinya.html> diakses 28 september 2012.

⁷² *Ibid.*

hasil dari kekayaan alam yang terkandung di Celah Timor membuat Australia berhasil mendapatkan hak untuk melakukan eksplorasi di tempat tersebut yang merupakan tujuan dari Australia.

2. Australia Mendukung Kemerdekaan Timor Leste

Australia sudah terlibat dalam masalah yang menyangkut Timor Leste sejak tahun 1970-an, ketika Indonesia melakukan invasi yang dianggap oleh banyak negara termasuk PBB merupakan langkah yang diambil Indonesia merupakan langkah yang ilegal untuk mempersatukan Timor Leste menjadi bagian dari negara Indonesia. Namun saat itu Australia menjadi negara yang mendukung langkah yang diambil Indonesia, karena Australia memiliki kepentingan keamanan yang luar biasa. Dengan iklim perang dingin yang mengancam keamanan negara, maka Australia jelas berkepentingan agar Timor Leste ini tidak menjadi sumber instabilitas kawasan Asia Tenggara yang jadi zona penyangga keamanannya dari serangan utara. Karena pada waktu itu komunis sudah masuk ke Timor Leste. Sejak awal Australia memahami langkah yang diambil Indonesia untuk menggabungkan kawasan berpenduduk sekitar satu juta itu kedalam negara kesatuan RI. Bahkan secara eksplisit mengakui kedaulatan Indonesia atas Timor Leste tersebut.

Namun dengan hadirnya PM John Howard sikap Australia berubah total. Mereka mulai menyatakan bahwa Timor Leste untuk jangka panjang harus merdeka. Australia mulai mengubah kebijakannya

atas Timor Leste dengan dasar bahwa otonomi luas harus diberikan kepada Timor Leste sebelum merdeka penuh.⁷³

Sejak PM John Howard berkuasa dan terjadinya gejolak reformasi di Indonesia sehingga berada pada posisi lemah dalam tawar menawar diplomatik, Howard mendorong agar Indonesia melepaskan Timtim. Presiden BJ Habibie tak sadar terpengaruh gagasan Howard yang dilontarkan bulan Desember 1998. Habibie pada bulan Januari 1999 menyatakan Timtim akan diberi dua pilihan otonomi luas atau menolaknya sehingga bisa memilih melepaskan diri dari Indonesia.⁷⁴

Dengan berubahnya kebijakan yang diambil oleh Australia ini jelas menimbulkan pertanyaan besar. Bagaimana bisa kebijakan di tahun 1975 dimana ketika itu Australia memberikan dukungan terhadap Indonesia untuk menginvasi Timor Leste, tiba-tiba berubah di tahun 1998 yang berbalik mendukung Timor Leste menjadi negara yang merdeka dari Indonesia.

Hal ini jelas menunjukkan bahwa Australia mempunyai keinginan menguasai sumber minyak di celah Timor. Akses terhadap energi ini tak bisa disangkal menjadi pendorong semangat Australia campur tangan dalam menangani gejolak di Timtim pasca jajak pendapat. Minyak yang dilukiskan sangat besar kandungannya di perbatasan Timor Leste dan

⁷³ Asep Setiawan, "Kepentingan Australia di Timor-Timur", dalam <http://globalisasi.wordpress.com/2006/07/10/kepentingan-australia-di-timor-timur/> diakses 9 oktober 2012

⁷⁴ *Ibid.*

Australia merupakan aset penting bagi perkembangan ekonomi masa depan negeri Australia.⁷⁵

Karena pada saat itu status kesepakatan Celah Timor yang telah memberikan hak legal terhadap Australia untuk melakukan eksplorasi minyak dan gas di Celah Timor banyak dipertanyakan tentang kelegalitasannya. Terlebih banyak desakan dari dunia Internasional tentang pelanggaran HAM yang dilakukan Indonesia terhadap Timor Leste, dan juga tuntutan PBB yang tidak pernah mengakui kedaulatan Indonesia terhadap Timor Leste, agar Timor Leste Menjadi negara yang merdeka.

Selain itu pada tahun 1991, Portugal menuntut haknya dengan mengadukan Australia ke pengadilan Internasional, dengan tuduhan bahwa perjanjian atau kesepakatan Celah Timor itu tidak sah dan merugikan bagi Portugal ataupun bagi rakyat Timor Leste secara material.⁷⁶

Dengan tekanan yang luar biasa dari dunia Internasional untuk kemerdekaan Timor Leste dari Indonesia, dimana Australia merasa ikut bertanggung jawab atas invasi yang dilakukan oleh Indonesia terhadap Timor Leste dimana ketika itu Australia merupakan satu-satunya negara barat yang mengakui kedaulatan Indonesia atas Timor Leste. Ditambah

⁷⁵ Efendi Arianto, " *Motivasi Ekonomi dalam Hubungan Antar Negara: Kasus Timor Leste*", dalam <http://strategika.wordpress.com/2008/02/13/motivasi-ekonomi-dalam-hubungan-antar-negara-kasus-timor-leste/> diakses 9 oktober 2012

⁷⁶ <http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/2s1hi/207613041/bab4.pdf> diakses 16 september 2012.

lagi Australia juga berkepentingan untuk mengamankan hak legalnya untuk mengeksplorasi minyak dan gas yang ada di Celah Timor, dimana kesepakatan Celah Timor yang dilakukannya dengan Indonesia yang memberikan kelegalan tersebut mulai dipertanyakan di dunia Internasional semanjak tuntutan Portugal di tahun 1991, meskipun mahkamah Internasional tidak menanggapi secara positif tuntutan tersebut.

Dengan alasan-alasan tersebutlah maka Australia memberikan dukungan terhadap Timor Leste untuk merdeka dari Indonesia dengan harapan setelah Timor Leste merdeka maka Australia bisa melakukan perjanjian ulang dengan Timor Leste mengenai pembagian hasil eksplorasi minyak di Celah Timor yang sebelumnya hak tersebut didapatkan dari perundingan dengan Indonesia yang sekarang dipertanyakan keabsahannya.

Selain kepentingan ekonomi tersebut, ternyata Australia juga mempunyai kepentingan politik dibalik pemberian dukungan terhadap rakyat Timor Leste dari kekuasaan Indonesia. Kepentingan politik tersebut adalah Australia ingin menunjukan terhadap Indonesia dan dunia bahwa Australia merupakan negara yang patut diperhitungkan dalam kancah politik internasional. Australia ingin menunjukan bahwa eksistensinya sebagai aliansi Amerika Serikat, mampu menjalankan tugasnya sebagai pengaman di kawasan Asia tenggara.

Sementara itu bentuk dukungan yang dilakukan Australia terhadap kemerdekaan Timor Leste diantaranya adalah, pertama Menteri John Howard yang terkenal rasis mengirim surat ke presiden Habibie yang mengusulkan agar Indonesia memberi otonomi ke Timor Timur. Howard bahkan memaparkan bahwa otonomi adalah pelangkahan bagi rakyat setempat yang akan merdeka beberapa tahun kemudian. Surat Howard memuat syarat yang menegaskan bahwa akhir kelaknya jajak pendapat akan terjadi, inilah bagian yang oleh pemerintah Indonesia dianggap sebagai batang tubuh surat itu. Howard ternyata yakin bahwa kebanyakan orang Timor Timur menginginkan kemerdekaan.⁷⁷

Dengan pengiriman surat oleh Howard kepada Habibie yang berisi tentang desakannya agar Indonesia mmberikan kemerdekaan terhadap Timor Leste, Howard ingin menunjukan kepada rakyat Timor Leste bahwa sebenarnya Australia mendukung keinginan rakyat Timor Leste untuk mendapatkan kemerdekaan dari Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mendapat simpatik dari Timor Leste untuk melancarkan kepentingannya atas minyak dan gas di Celah Timor.

Selain itu Australia juga memberikan dukungan kepada Pemerintahan de facto Fretilin yang pada prinsipnya memberikan akses kepada perwakilan pemberi bantuan untuk pergi ke seluruh wilayah Timor Leste. Dalam prakteknya, perwakilan utama menyediakan bantuan pangan kepada masyarakat, ICRC membatasi kegiatan bantuannya ke

⁷⁷ Vitalis Goo, "Kepentingan Australia Terhadap Timor Timur", dalam <http://www.vitalis-gooubo-goo.blogspot.com/> diakses 26 september 2012.

wilayah di sekitar Dilli, dengan dukungan yang disediakan ACFOA (Australian Council for Overseas Aid) dan didistribusikan oleh Fretilin di daerah wilayah kekuasaan mereka.⁷⁸ Dengan kata lain dukungan berupa bantuan langsung yang bersangkutan dengan kebutuhan sehari-hari juga diberikan oleh Australia terhadap masyarakat Timor Leste. Dan seharusnya Timor Leste dari awal sudah sadar bahwa dalam memberikan atau menerima bantuan, negara-negara dihadapkan kepada persoalan-persoalan politik dan persoalan-persoalan ekonomi. Sehingga dalam pemberian bantuan suatu negara menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat benar-benar politik.⁷⁹ Begitupun dengan apa yang dilakukan Australia, dimana ada kepentingan-kepentingan baik yang bersifat ekonomi ataupun politik di balik pemberian bantuan terhadap Timor Leste.

Dengan segala upaya internasional dan juga usaha-usaha Australia untuk mendukung kemerdekaan Timor Leste, Akhirnya pada tanggal 5 Mei 1999, Perserikatan Bangsa Bangsa, Indonesia dan Portugis menandatangani perjanjian Tripartit yang menyatakan bahwa PBB akan menyetujui jajak pendapat di Timor Timur. Rakyat diminta memilih apakah Timor Timur tetap menjadi bagian dari Indonesia ataukah Timor Timur menjadi negara merdeka. Pada tanggal 30 Agustus 1999, rakyat Timor Timur memilih merdeka (78,5%). Pengumuman hasil pemilihan umum tersebut diikuti dengan kekerasan yang meluas oleh

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Charles P. Kindleberger, *Ekonomi Internasional*, terj. J. Bunardi, Jakarta, Aksara Baru, 1977, hal. 74.

unsur-unsur pro integrasi yang eksis bergabung dengan Indonesia. Australia memainkan peranan pokok dalam memobilisasi tanggapan internasional terhadap krisis kemanusiaan di Timor Timur. Jakarta menyetujui keterlibatan angkatan internasional pemeliharaan keamanan di kawasan ini. Kekuatan internasional di Timor Timur atau *International Force in East Timor* (disingkat INTERFET) telah berhasil dikirim ke Timor Timur dan menjalankan tugasnya untuk mengembalikan perdamaian dan keamanan di kawasan tersebut. Australia diminta oleh PBB untuk memimpin angkatan internasional, dan menerima tugas ini. Pada tanggal 20 Oktober 1999, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mencabut keputusan penyatuan Timor Timur dengan Indonesia.⁸⁰

Dengan keputusan MPR Indonesia yang mencabut keputusan penyatuan Timor Timur dengan Indonesia, menandai mulainya kemerdekaan sebuah negara baru yang bernama Timor Leste yang didapatkan dengan dukungan internasional dan usaha-usaha yang dilakukan negara tetangganya yaitu Australia dengan segala kemampuannya untuk mendesak Jakarta untuk memberikan kemerdekaan terhadap Timor Leste. Dengan kepentingan yang luar biasa terhadap minyak dan gas di Celah Timor yang dibalut dengan alasan kemanusiaan.

⁸⁰ Vitalis Goo, "Kepentingan Australia Terhadap Timor Timur", dalam <http://www.vitalis-goobo-goo.blogspot.com/> diakses 26 september 2012.

C. Periode 2000-2005,

1. Australia Berunding Tentang Kesepakatan Laut Timor Dengan Timor Leste

Setelah Timor Timur melepaskan diri dari Indonesia dan menjadi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat sepenuhnya yang sekarang menjadi negara Timor Leste, Australia mulai menunjukkan apa yang sebenarnya mereka inginkan dari negara tetangganya yang baru merdeka tersebut. Alasan utama Australia menginginkan Timor Leste menjadi sebuah negara yang merdeka adalah karena kandungan minyak dan gas yang berada di wilayah Timor Leste.

Sumber daya alam berupa minyak dan gas, saat ini menjadi salah satu komoditi yang sangat berharga dan penting bagi semua negara. Karena hampir semua energi yang dibutuhkan negara-negara didunia yang dipergunakan untuk teknologi guna memproduksi ataupun mengkonsumsi, bersumber dari sumber daya minyak dan gas. Untuk itu minyak dan gas memiliki posisi penting dalam menentukan posisi ekonomi, politik, bahkan menentukan strategi suatu negara.

Kepentingan terselubung Australia yang membuat negara ini memberikan dukungan terhadap kemerdekaan Timor Leste mulai tampak ketika muncul rasa kekhawatiran Australia terhadap eksistensi kesepakatan Celah Timor yang dilakukan dengan Indonesia yang telah memberikan hak untuk melakukan eksplorasi minyak di Celah Timor, mulai dipertanyakan karena Timor Leste telah menjadi negara yang

merdeka dan tidak di bawah kekuasaan Indonesia lagi. Dengan demikian perjanjian yang dilakukan dengan Indonesia tidak berlaku lagi bagi Timor Leste yang telah merdeka.

Setelah Timor Leste dinyatakan merdeka maka Dewan Keamanan PBB membuat resolusi 1272 (1999) yang menugaskan UNTAET untuk menjaga kestabilan Timor Leste paska kemerdekaan. UNTAET (United Nations Transitional Administration in East Timor; bahasa Indonesia: *Administrasi Sementara PBB di Timor Timur*) adalah pemerintahan sipil yang bertujuan untuk memelihara misi perdamaian di Timor Timur.⁸¹ Setelah resolusi tersebut dikeluarkan oleh PBB maka praktis pemerintahan di Timor Leste di pegang oleh UNTAET, hingga keadaan politik di Timor Leste lebih stabil.

Kemudian setelah Australia menyadari bahwa kesepakatannya dengan Indonesia dianggap sudah tidak berlaku lagi, maka Australia mendekati UNTAET untuk mengamankan eksistensinya dalam pengeboran minyak di Celah Timor. Kesepakatan UNTAET-Australia pertama yang dibuat pada tahun 2000 melanjutkan ketentuan-ketentuan yang tertera dalam Kesepakatan Celah Timor pada tahun 1989 antara Indonesia dan Australia tetapi hanya menggantikan “Indonesia” dengan “Timor Lorosa’e” dalam seluruh naskah itu. Pembagian pendapatan 50-50 dari daerah Kerjasama Area A (yang sekarang disebut Wilayah pengembangan minyak bersama) tetap dipertahankan, lalu dibentuk pula

⁸¹ UNTAET, dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/UNTAET>, diakses 24 oktober 2012.

suatu badan bersama antara dua negara (Otoritas Bersama Wilayah pengembangan minyak bersama) yang berada di bawah kontrol bersama UNTAET dan Australia untuk tetap mengelola eksplorasi tersebut. Tahun berikutnya, UNTAET dan Australia merundingkan kembali kesepakatan tersebut guna membagi produksi minyak di dalam zona itu. Hasil dari perundingan itu adalah 90% dari pendapatan minyak dan gas akan diterima oleh Timor Lorosa'e dan 10%nya akan diterima oleh Australia. Kemudian pada bulan Juli 2001, Rancangan perjanjian laut Timor itu ditandatangani. Dengan demikian maka Australia secara terimplisit mengakui bahwa secara hukum JPDA terletak di dalam Zona Ekonomi Eksklusif Timor Lorosa'e. Akan tetapi, Otoritas Bersama tetap sama yakni di bawah kontrol bersama Dili dan Canberra dengan basis di Darwin.⁸²

Dalam bulan-bulan menjelang kemerdekaan, rancangan ini diubah ke dalam Kesepakatan Laut Timor antara Timor Lorosa'e dan Australia yang kemudian ditandatangani pada tanggal 20 Mei 2002, pada hari pertama Timor Lorosa'e dinyatakan sebagai suatu negara merdeka. Kesepakatan Laut Timor melanjutkan pembagian 90-10, tetapi mendefinisikan kembali Otoritas Bersama sebagai Otoritas perwakilan Laut Timor (TSDA) dan Timor Lorosa'e diberikan dua dari tiga Kepala Komisi TSDA. Tidak ada satu pembicaraan pun yang dilakukan oleh UNTAET dan Australia mengenai wilayah-wilayah di luar ZOC/JPDA,

⁸² "Latar Belakang Sejarah Laut Timor", Buletin Lao Hamutuk, vol 4, no 3-4, Agustus 2003, hal 3.

yang telah Australia lakukan eksplorasi kekayaan dasar laut, yang mana secara hukum seharusnya merupakan milik Timor Lorosa'e. Walaupun Kesepakatan Laut Timor dan Kesepakatan lainnya menyatakan bahwa kesepakatan-kesepakatan itu "tanpa merugikan" penyelesaian batas laut di masa depan (kesepakatan-kesepakatan itu dengan sendirinya tidak berlaku ketika batas-batas negara disepakati), tetapi nampaknya tidak ada keinginan dari Australia untuk menentukan batas laut yang nantinya akan mengakhiri pendudukan laut yang menguntungkan sampai semua minyak habis dieksplorasi atau disulingkan.⁸³

Hal tersebut menunjukkan bahwa kepentingan Australia di Celah Timor semakin terlihat nyata. Dan alasan Australia untuk mendukung kemerdekaan Timor Leste ternyata dengan alasan ingin memperbaharui kesepakatan Celah Timor yang mulai dipertanyakan dunia internasional, agar hak legal untuk mengeksplorasi minyak dan gas di Celah Timor tetap diperoleh Australia.

2. Australia Bernegosiasi Dengan Timor Leste Untuk Menunda Penetapan Perbatasan Di Celah Timor

Setiap negara yang merdeka pasti ingin memiliki wilayah yang berdaulat dimana status wilayah yang menjadi bagian dari negara yang bersangkutan menjadi jelas. Selain itu kejelasan status wilayah negara juga diperlukan untuk menghindari konflik dengan negara yang lain yang berbatasan langsung dengan negara tersebut. Karna jika status wilayah

⁸³ *Ibid*

negara jelas maka perbatasan yang memisahkan suatu negara tersebut dengan negara lain juga menjadi jelas.

Timor Leste sebagai negara yang baru merdeka juga menginginkan status wilayah dan perbatasan yang jelas, terutama untuk wilayah Celah Timor yang memisahkan antara Timor Leste dan Australia, yang sebelumnya statusnya tidak jelas yang disebabkan adanya banyak kepentingan dari negara-negara tetangga seperti Indonesia dan Australia. Untuk itu Timor Leste menginginkan status perbatasan yang jelas tentang wilayahnya setelah merdeka dari Indonesia sesuai dengan penetapan perbatasan suatu negara berdasarkan atas hukum batas laut yang sah, atau yang diberlakukan di dunia internasional dan disahkan oleh PBB.

Setelah penyerahan kedaulatan penuh oleh UNTAET (United Nations Transition in East Timor) kepada pemerintah baru Timor Leste pada 20 Mei 2002, rakyat Timor Leste menyelenggarakan pemerintah sebagai negara yang merdeka. Pemerintah sebagai pelaksanaan amanat rakyat tentu berusaha untuk mempertahankan semua teritori baik batas, udara maupun laut guna mempertahankan kedaulatannya. Implementasinya adalah pemerintah Timor Leste melakukan Pendekatan bilateral kepada pemerintah Australia untuk membicarakan batas laut

kedua negara agar integritas nasional kedua negara menjadi jelas serta pemanfaatan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya.⁸⁴

Hal ini dilakukan Timor Leste karena ketika masih dibawah pemerintahan UNTAET, pada tahun 2000 Australia dan UNTAET mengadakan pembahasan, namun pembahasan tersebut hanya membahas tentang pembaharuan kesepakatan mengenai pembagian hasil ladang minyak di Celah Timor. Dan sama sekali tidak membahas masalah kejelasan perbatasan antara Timor Leste dan Australia, sebagaimana seperti yang diharapkan masyarakat Timor Leste.

Padahal ketika itu pada bulan November 2000, kantor perwakilan PBB telah mengingatkan perwakilan Australia di PBB agar menyepakati diberlakukannya hukum laut PBB dan bersedia untuk menyelesaikan masalah batas laut tersebut melalui apa yang disebut ICJ (International Court of Jurisdiction).⁸⁵ Peringatan ini justru dibalas Pemerintah PM J. Howard dengan mengambil sikap keluar dari IJC. Sikap ini menunjukkan ambisi Australia yang berlebihan untuk menguasai sumber daya alam di Celah Timor yang seharusnya menjadi milik negara Timor Leste. Agar tidak menimbulkan kontroversi di forum internasional maupun di dalam negerinya, Australia bersedia menegosiasikan kembali isi kesepakatan yang dulu telah diputuskan

⁸⁴ <http://www.library.upnvi.ac.id/pdf/2s1hi/207613041/bab1.pdf> diakses 25 oktober 2012

⁸⁵ "Congress Urges Expedition Talks on Permanent Maritime Boundary for East Timor" dalam <http://www.library.upnvi.ac.id/pdf/2s1hi/207613041/bab1.pdf> diakses 25 oktober 2012

bersama dengan Indonesia. Namun Australia membatasi diri hanya pada masalah proporsi pembagian keuntungan dari kegiatan eksploitasi minyak dan gas di Celah Timor, bukan pada masalah perbatasan lautnya dengan Timor Leste.⁸⁶ Dan dengan keluarnya Australia dari aturan-aturan Mahkamah Internasional (ICJ) dan pengadilan Konvensi Hukum Laut PBB, maka hal itu semakin mempersulit Timor Leste untuk menuntut penetapan perbatasan dengan Australia menggunakan Hukum Internasional.

Sikap Australia tersebut karena dilatar belakangi oleh kepentingan yang luar biasa untuk dapat menguasai ladang-ladang minyak yang terdapat di Celah Timor. Karena jika batas wilayah laut yang memisahkan Timor Leste dan Australia ditetapkan dengan menggunakan hukum batas laut yang berlaku di internasional dan disahkan PBB, yaitu dengan menarik garis tengah diantara Timor Leste dan Australia, maka ladang-ladang minyak dan gas yang ada di Celah Timor akan sepenuhnya menjadi milik dari Timor Leste. Dan itu berarti hak Australia untuk mengeksplorasi minyak akan hilang.

Australia berusaha mempertahankan haknya untuk mendapatkan hasil dari minyak dan gas di Celah Timor. beberapa usahanya adalah memberikan ancaman terhadap Timor Leste. Pada saat kunjungan ringkasnya di Dili, Howard menyatakan dua ancaman terselubung. *Pertama*, ia secara tegas mengatakan bahwa tidaklah akan ada bantuan

⁸⁶ Nuno Rodrigues, Pembatasan Batas Perairan Berjalan Lamban, Dili, Iaohamutuk, 2004, vol.2, no 4. Hal 7

dana yang besar, memperingatkan para pimpinan Timor Timur bahwa keberhasilan perekonomian negaranya tergantung pada “kemampuan penciptaan suasana usaha yang memadai dan dapat mengundang para investor asing”. *Kedua*, Howard menyatakan bahwa Australia akan mempertahankan 1.200 pasukan di Timor Timur “selama masih dibutuhkan”. Sebagaimana pandangan beberapa pengamat, walau pemampilan pasukan ini ditujukan langsung untuk menghindari timbulnya aktivitas para milisi pro-Indonesia, kepentingan utama Canberra adalah pengamanan operasi minyak dan gasnya.⁸⁷

Usaha Australia yang berikutnya adalah mengadakan negosiasi dengan Timor Leste dengan tujuan membuat Timor Leste mau menunda tuntutan atas status perbatasan diantara kedua negara. Karena jika perbatasan ditentukan dengan hukum batas laut PBB maka Australia tidak akan lagi bisa mengeksplorasi minyak di Celah Timor.

Perundingan pertama mengenai perbatasan laut diadakan di Darwin pada tanggal 12 November 2003. Timor Leste mengajukan usul agar pertemuan diadakan setiap bulan sekali sehingga permasalahan perbatasan lebih cepat diselesaikan. Tetapi Australia hanya mau mengaadakan pertemuan setiap enam bulan sekali dengan alasan mereka tidak mempunyai cukup uang dan wakil untuk seringkali

⁸⁷ Mike Head, “Australia menggertak Timor Timur “merdeka” atas minyak dan gas,” dalam <http://www.wsws.org/id/2002/mei2002/timo-m30.shtml> diakses 29 februari 2012

membahas persoalan batas perairan itu.⁸⁸ Australia menganggap bahwa proses penentuan batas perairan Laut Timor memerlukan waktu yang panjang dan kompleks.

Kemudian perundingan yang kedua diadakan di Dili yang berlangsung pada tanggal 19-22 April 2004. Pada perundingan ini Australia menginginkan batas laut masih tetap seperti yang dulu, dimana mengikuti persetujuannya dengan Indonesia, saat Timor Leste masih menjadi bagian negara itu. Tim perunding Timor Leste takut jika perundingan akan berjalan lamban. Sementara itu Perdana Menteri Timor Leste memperingatkan pemerintahannya yang akan menyetujui ratifikasi kesepakatan kerja sama untuk mengeksploitasi ladang minyak Greater Sunrise jika Australia tidak bernegosiasi dengan kepercayaan yang baik.⁸⁹ Dengan kata lain Timor Leste melalui Perdana Menteriya mengancam akan membatalkan kesepakatan pengeksplorasian ladang minyak Greater Sunrise yang akan disetujui Australia dan Timor Leste.

Pada bulan September 2004, Timor Leste dan Australia kembali melakukan perundingan. Tim perundingan dari Timor Leste, termasuk Menteri Industri Timor Leste, Jose Teixeira, berada di Darwin untuk melanjutkan negosiasi batas perairan dan termasuk sumber minyak dan gas di Laut Timor. Kemudian pada tanggal 27 Oktober 2004 delegasi Australia mengadakan perundingan putaran ketiga dengan Timor Leste di

⁸⁸ Pembahasan Batas Perairan Berjalan Lamban, Buletin Lao Hamutuk, vol 5, no 3 Maret 2004, hal 5, dikutip oleh Tulus Warsito, "DIPLOMASI PERBATASAN", Yogyakarta, LP3 UMY, 2009, hal. 89

⁸⁹ Tulus Warsito, "DIPLOMASI PERBATASAN", Yogyakarta, LP3 UMY, 2009, hal. 89-90.

Dili. Pada perundingan ini Australia tetap meminta Timor Leste untuk menunda tuntutan batas laut antar kedua negara. Australia menawarkan kenaikan jumlah bagian yang akan diterima Timor Leste dari proyek Greater Sunrise menjadi 4 miliar dollar AS, dari yang semula 2 miliar dollar AS. Namun Timor Leste tetap menginginkan batas laut berada ditengah di antara dua negara, dimana Timor Gap hanya berjarak 150 kilometer persegi (90 mil) dari pantai Timor Leste.⁹⁰

Setelah itu pada tanggal 7 Maret 2005 Timor Leste dan Australia kembali bernegosiasi di Canberra. Delegasi pelobi Timor Leste mengklaim pemerintah Australia menolak untuk tunduk pada prinsip-prinsip Hukum Internasional. Kemudian untuk memperedam suasana Australia menawarkan 5 miliar dollar AS sebagai salah satu bentuk pembayaran dari ladang minyak Greater Sunrise, jika Timor Leste bersedia menunda kedaulatannya di Timor Gap. Pada perundingan ini kedua negara membicarakan masalah yang lebih difokuskan pada kompromi yang akan mengatur tentang semua batas perairan permanen kedua negara itu dan pembagian pendapatan dari ladang minyak Greater Sunrise.⁹¹

Pada bulan April 2005 kedua negara mengadakan negosiasi putaran ke lima, dimana pemerintah Timor Leste menyatakan dua negara hampir mencapai kesepakatan untuk membuka "harta karun" di wilayah Celah Timor. Australia dan Timor Leste akan mengatur semuanya

⁹⁰ *Ibid.* Hal. 92-93.

⁹¹ *Ibid.* hal. 93-94

mengenai pendapatan minyak dan gas yang bernilai miliaran dollar AS. Dan Timor Leste setuju menunda tuntutan atas batas laut Timor. Di bawah kesepakatan ini Timor Leste akan mendapat pendapatan dari ladang minyak Greater Sunrise yang meningkat menjadi 5 miliar dollar AS, dari yang semula hanya 2 miliar dollar AS. Kemudian pada tanggal 11-13 Mei 2005, negosiasi kembali digelar yang bertujuan untuk membicarakan lebar perbatasan laut dari kedua negara. Dan Timor Leste menyetujui permintaan Australia untuk menunda penuntutan batas laut Timor dengan peningkatan pendapatan Timor Leste dari ladang minyak Greater Sunrise dari 2 menjadi 5 miliar dollar AS. Dan Menteri Luar Negeri Timor Leste, Jose Ramos Horta menyatakan bahwa pemerintahnya akan menyetujui untuk menangguhkan tuntutan batas laut selama 50 tahun.⁹²

Akhirnya setelah menggunakan berbagai cara untuk mempertahankan hak atas minyak di Celah Timor, Australia berhasil setelah bernegosiasi dengan Timor Leste dimana negosiasi berjalan sekitar 3 tahun. Dan setelah Australia memberikan peningkatan pembagian hasil pada Timor Leste atas hasil dari ladang minyak Greater Sunrise, akhirnya Timor Leste bersedia menangguhkan tuntutan batas laut Timor selama 50 tahun kedepan. Dan itu artinya selama 50 tahun kedepan Australia tetap bisa melakukan eksplorasi di Celah Timor.

⁹² *Ibid*, hal. 94-95

Kelihatannya hanya kerja-samalah yang merupakan satu-satunya garis yang wajar untuk diikuti, berhubung terdapatnya penjelmaan saling-ketergantungan yang erat dari perekonomian-perekonomian nasional, sifat terbatas sumber-sumber sedunia, dan bahaya-bahaya yang belum pernah terjadi bagi manusia sebelumnya, sebagai akibat dari persengketaan-persengketaan baru.⁹³ Jadi alasan utama Timor Leste mau mengikuti kesepakatan yang ditawarkan Australia karena Timor Leste memerlukan investor untuk pengeksplorasi minyak di Celah Timor, dan juga Timor Leste menghindari kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan dialami jika menolak penawaran Australia tersebut.

Dan kemungkinan besar Australia akan berusaha mengeksplorasi minyak semaksimal mungkin dari Celah Timor, tanpa harus memperhatikan prinsip-prinsip penghematan. Karena Australia hanya memiliki waktu 50 tahun untuk mengeksplorasi minyak dan gas di Celah Timor. Padahal negara produsen minyak seharusnya memandang bahwa pengelolaan minyak sebagai sesuatu yang akan berpengaruh besar bagi negara, dan itulah sebabnya maka semua negeri harus serta bertanggung jawab atas pengelolaannya. Selain itu ada kemungkinan bahwa semakin cepat pengambilan dari suatu sumur minyak tertentu, semakin sedikit jumlah minyak yang akan diperoleh dari sumur tersebut.⁹⁴ Itu artinya kemungkinan besar Timor Leste tidak akan bisa

⁹³ Unesco, *Bergerak Menuju Perubahan*, terj. R. Soeradji Wirjowikarto, Jakarta, Tintamas Indonesia, 1978, hal. 40.

⁹⁴ Laporan dari The Independent Commission on International Development Issues pimpinan Willy Brandt, "UTARA-SELATAN", Jakarta, Leppenas, 1980, hal. 189.

menikmati hasil minyak dari Celah Timor secara maksimal, karena dalam jangka 50 tahun kedepan Australia akan melakukan eksplorasi dengan semaksimal mungkin untuk memaksimalkan waktu yang dimiliki yaitu hanya 50 tahun. Dan jika pengeksplorasian dilakukan secara cepat maka hasil minyak yang didapatkan dan yang akan dibagi dengan Timor Leste juga akan semakin sedikit.